

# HUBUNGAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (IPKD) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KINERJA TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Theofilus M. Pande

NPP. 32.0741

*Asdaf Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email: [32.0741@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0741@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Dr. Ira Meiyenti, S.IP M.Si

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** *The policy of measuring financial performance through the Regional Financial Management Index (IPKD) based on Permendagri No. 19 of 2020, the results of the Central Kalimantan Province's IPKD during the 2021–2023 period are still relatively low and are included in the category of "very much in need of improvement." This shows that there is a gap between the ideal goals of the IPKD policy in creating effective, efficient, transparent, and accountable financial governance and factual implementation in the field. Factors that affect the low IPKD score include inaccuracy of data input, lack of coordination between regional apparatus, and weak technical understanding related to the dimensions of IPKD. Purpose:* This study aims to analyze the implementation of the Regional Financial Management Index (IPKD) in improving the quality of regional financial governance performance in Central Kalimantan Province and identify factors that hinder the achievement of optimal IPKD values. **Methods:** *This study uses a mix-method approach (quantitative and qualitative). The theory used (Nilsen, 2015). Quantitative data was obtained from APBD, RPJMD, and IPKD documents. Qualitative data was collected through in-depth interviews and documentation from relevant regional apparatus, namely Bappedalitbang, BKAD, and the Central Kalimantan Provincial Communication and Information Service. Qualitative data analysis was carried out using the Miles and Huberman model. Results:* The results of the study show that the implementation of IPKD in Central Kalimantan Province is still not optimal. This is marked by the results of the IPKD which are consistently in the category of "need improvement." Some of the dimensions that are still weak include transparency, budget absorption, and regional financial conditions. In addition, the use of Regional Original Revenue (PAD) has not been maximized, low spending efficiency, and lack of public sector involvement have also affected the performance of IPKD. **Conclusion:** *The implementation of IPKD in Central Kalimantan has not been fully effective in encouraging improvement of regional financial governance. Therefore, it is necessary to strengthen coordination between agencies, improve the competence of human resources, and implement simulations and technical guidance related to IPKD measurement.*

**Keywords:** *implementation, Regional Financial Management Index (IPKD), Financial Performance Governance*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kebijakan pengukuran kinerja keuangan melalui Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2020, hasil IPKD Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2021–2023 masih tergolong rendah

dan masuk dalam kategori “sangat perlu perbaikan.” Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal kebijakan IPKD dalam menciptakan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan implementasi faktual di lapangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya skor IPKD antara lain adalah ketidaktepatan penginputan data, kurangnya koordinasi antarperangkat daerah, serta lemahnya pemahaman teknis terkait dimensi-dimensi IPKD. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dalam meningkatkan kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pencapaian nilai IPKD yang optimal. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan mix-method (kuantitatif dan kualitatif). Teori yang digunakan (Nilsen, 2015). Data kuantitatif diperoleh dari dokumen APBD, RPJMD, dan nilai IPKD. Data Kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi dari perangkat daerah terkait, yaitu Bappedalitbang, BKAD, dan Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Tengah. Analisis data kualitatif dilakukan dengan model Miles dan Huberman. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan IPKD di Provinsi Kalimantan Tengah masih belum maksimal. Hal ini ditandai dengan hasil IPKD yang konsisten berada dalam kategori “perlu perbaikan.” Beberapa dimensi yang masih lemah antara lain adalah transparansi, penyerapan anggaran, serta kondisi keuangan daerah. Selain itu, belum maksimalnya pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), rendahnya efisiensi belanja, serta kurangnya keterlibatan sektor publik turut memengaruhi kinerja IPKD. **Kesimpulan:** Implementasi IPKD di Kalimantan Tengah belum sepenuhnya efektif dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penyelenggaraan simulasi dan bimbingan teknis terkait pengukuran IPKD.

**Kata Kunci:** implementasi, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Tata Kelola Kinerja Keuangan

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah harus mengacu pada prinsip hemat, adil, dan setara, namun realitasnya masih terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program. Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memperbaiki sistem tata kelola dan memaksimalkan pencapaian tujuan pemerintahan (Hasna et al., 2023). Temuan serupa juga dikemukakan oleh (Idrovo, 2021) dalam penelitiannya di Portugal yang menunjukkan bahwa implementasi sistem pengukuran kinerja keuangan daerah memerlukan keseimbangan antara akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi untuk mencapai tujuan good governance secara optimal. Salah satu instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menerapkan prinsip value for money. Dalam praktiknya, masih banyak tantangan seperti kurangnya keterpaduan dalam dokumen perencanaan (RPJMD), serta rendahnya transparansi dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkenalkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebagai alat ukur kinerja tata kelola keuangan daerah berdasarkan enam dimensi utama, antara lain: perencanaan dan penganggaran, alokasi anggaran, transparansi, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini BPK atas LKPD (Permendagri No. 19 Tahun 2020).

IPKD memberikan penilaian yang terukur terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan tiga tingkatan kompetensi (rendah, sedang, tinggi) dan tiga kategori hasil (baik, perlu perbaikan, sangat perlu perbaikan). Pendekatan pengukuran kinerja melalui indeks komposit seperti IPKD sejalan dengan praktek internasional yang dilakukan di berbagai negara,

sebagaimana diungkapkan oleh (Parisi, 2022) yang meneliti sistem pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah di Spanyol dan Italia, dimana indeks komprehensif terbukti lebih efektif dalam menilai kualitas tata kelola keuangan dibandingkan indikator tunggal. Berdasarkan hasil pengukuran IPKD tahun 2021–2023, Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan tren peningkatan nilai IPKD dari 38,26 menjadi 56,5. Meskipun demikian, provinsi ini masih tergolong dalam kategori “sangat perlu perbaikan” terutama pada dimensi perencanaan, transparansi, penyerapan anggaran, dan kondisi keuangan daerah. Penilaian dimensi oleh BPK terhadap LKPD Kalimantan Tengah telah mencapai skor maksimal, namun dimensi lain masih menunjukkan hasil yang belum optimal.

Adapun nilai pada dimensi transparansi dan penyerapan anggaran berada jauh di bawah bobot maksimal, yang menandakan perlunya peningkatan dalam publikasi data keuangan dan realisasi penggunaan anggaran. Efisiensi belanja daerah juga menjadi perhatian penting, sebab pengeluaran yang tidak tepat sasaran atau boros akan menurunkan nilai IPKD. Sebaliknya, belanja yang berkualitas dan tepat guna akan meningkatkan nilai tersebut. Dimensi keberlanjutan fiskal, kemandirian keuangan, dan keadilan moneter juga menjadi bagian integral dari penilaian IPKD, mengindikasikan pentingnya pengelolaan pendapatan, pengeluaran, dan defisit secara berimbang.

Oleh karena itu, IPKD tidak hanya menjadi indikator kinerja tetapi juga alat untuk pembinaan dan pemberian penghargaan kepada daerah dengan kinerja terbaik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah secara objektif dan terukur, serta menjadi dasar penetapan kebijakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penulis menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, perlu dilakukan penguatan pada empat dimensi IPKD yang masih lemah, yakni perencanaan dan penganggaran, kondisi keuangan, transparansi, dan penyerapan anggaran. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, maka ditetapkan judul kajian: “Hubungan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.”

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Kesenjangan masalah (gap penelitian) yang diangkat dalam kajian ini terletak pada masih rendahnya kualitas tata kelola keuangan daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, meskipun telah diterapkannya sistem pengukuran kinerja melalui Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami oleh berbagai negara berkembang lainnya. Sebagaimana dikemukakan oleh (Siti-Nabiha, 2020) dalam studinya terhadap sistem pengukuran kinerja keuangan daerah di China, bahwa implementasi instrumen evaluasi kinerja keuangan seringkali menghadapi kendala dalam hal kapasitas teknis, koordinasi antar-lembaga, dan pemahaman terhadap indikator pengukuran, yang berdampak pada rendahnya efektivitas sistem tersebut dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan. Hasil IPKD Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2021–2023 menunjukkan peningkatan nilai, namun masih berada dalam kategori “sangat perlu perbaikan”, terutama pada dimensi perencanaan dan penganggaran, transparansi, penyerapan anggaran, dan kondisi keuangan daerah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal penerapan IPKD yang menekankan pada efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi keuangan dengan kondisi faktual pengelolaan keuangan daerah di lapangan. Meskipun sudah tersedia instrumen evaluatif yang terstruktur dan diatur secara regulatif melalui Permendagri No. 19 Tahun 2020, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji sejauh mana hubungan antara IPKD dan kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, khususnya di wilayah yang masih tergolong dalam kategori IPKD rendah seperti Kalimantan Tengah. Dengan demikian, kajian ini penting untuk mengisi celah pengetahuan tersebut dengan fokus pada

evaluasi dan analisis hubungan IPKD terhadap peningkatan kinerja tata kelola keuangan daerah secara objektif dan terukur..

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Lima penelitian terdahulu yang dianalisis memberikan gambaran mendalam mengenai beragam pendekatan dalam menilai implementasi dan dampak Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) terhadap kualitas tata kelola keuangan di berbagai wilayah. Penelitian (Wibawa et al., 2021) di Kabupaten Jembrana menyoroti perlunya perbaikan dalam laporan keuangan daerah (LKPD) dan mendorong penggunaan IPKD sebagai alat motivasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Di sisi lain, (Hasna et al., 2023) meneliti dimensi pengalokasian anggaran dalam APBD dan menemukan adanya kendala teknis seperti human error, lemahnya sistem, serta ketidakjelasan regulasi yang berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran. Fokus mereka memperlihatkan bahwa permasalahan pengelolaan keuangan tidak hanya bersumber dari aspek kebijakan, tetapi juga dari implementasi teknis yang kurang optimal. Sementara itu, (Salsabila, 2022) melakukan penelitian kuantitatif untuk melihat pengaruh dimensi IPKD secara parsial dan simultan terhadap kinerja keuangan daerah di Kabupaten Semarang. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun secara simultan berpengaruh signifikan, secara parsial masih terdapat ketidakkonsistenan pengaruh, menandakan perlunya penguatan dalam setiap elemen IPKD.

Adapun (Putri, 2023) melalui pendekatan kualitatif menelusuri bagaimana penerapan IPKD di Provinsi Lampung mampu memperkuat prinsip akuntabilitas keuangan, terutama melalui peningkatan keterbukaan informasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa IPKD bukan hanya alat evaluasi kinerja, tetapi juga instrumen transparansi yang mendorong partisipasi publik. Penelitian lainnya oleh (Aditya, 2022) memfokuskan pada tren IPKD di Kabupaten Demak selama tiga tahun, yang menunjukkan penurunan kualitas dari kategori “baik” menjadi “perlu perbaikan,” menandakan bahwa konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah masih menjadi tantangan. Dari kelima penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun topik IPKD menjadi benang merah, terdapat perbedaan signifikan dalam lokasi, dimensi yang dikaji, dan fokus isu yang diangkat. Sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada empat dimensi IPKD yang mendapat skor rendah di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu perencanaan dan penganggaran, transparansi, penyerapan anggaran, serta kondisi keuangan daerah, yang masih menjadi hambatan dalam pencapaian tata kelola keuangan daerah yang ideal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dalam literatur mengenai bagaimana dimensi-dimensi IPKD yang lemah dapat diperkuat untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang terletak pada pendekatan analisis mendalam terhadap empat dimensi IPKD yang consistently mendapatkan skor rendah di Provinsi Kalimantan Tengah, yakni: perencanaan dan penganggaran, transparansi, penyerapan anggaran, dan kondisi keuangan daerah. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat deskriptif umum, studi ini menggunakan metode mixed methods untuk mengeksplorasi faktor penyebab secara simultan dan terukur, menggabungkan data kuantitatif (APBD, RPJMD, IPKD) dengan temuan kualitatif dari wawancara dan dokumentasi lapangan.

Berbeda dari penelitian (Putri, 2023) Provinsi Lampung yang menekankan peran IPKD sebagai alat akuntabilitas publik, atau (Aditya, 2022) di Kabupaten Demak yang memotret tren penurunan IPKD tanpa menyelami faktor internal, penelitian ini membawa perspektif baru dari wilayah yang secara nasional berada pada posisi “sangat perlu perbaikan” selama tiga tahun berturut-turut (2021–2023). Lokasi penelitian di Kalimantan Tengah belum banyak dikaji secara akademik dalam konteks IPKD, menjadikannya sebagai objek unik yang menunjukkan

tantangan nyata pengelolaan keuangan di daerah dengan kapasitas fiskal dan koordinatif yang masih terbatas.

Selain itu, studi ini berbeda dengan pendekatan parsial kuantitatif seperti yang dilakukan oleh (Salsabila, 2022) di Kabupaten Semarang, yang hanya menilai pengaruh dimensi IPKD terhadap kinerja fiskal tanpa menggali penyebab dari rendahnya skor IPKD. Penelitian ini juga memperluas cakupan isu yang diangkat oleh (Hasna et al., 2023) dan (Wibawa et al., 2021), yang terbatas pada kendala teknis dalam pelaporan dan penyerapan anggaran, dengan menambahkan analisis korelatif antara pendapatan, belanja, dan surplus/defisit terhadap skor IPKD, serta dimensi evaluatif terhadap struktur dan proses koordinasi lintas perangkat daerah.

### **1.5. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengelola keuangannya melalui penerapan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi IPKD dalam tata kelola APBD, serta mendorong peningkatan kinerja keuangan yang objektif dan terukur sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2020.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) dengan menggabungkan teknik kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap implementasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di Provinsi Kalimantan Tengah (Simangunsong, 2017). Penelitian dilaksanakan mengikuti jadwal akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yakni tanggal 6 Januari – 28 Januari 2025, dan bertempat di tiga instansi utama yaitu Bappedalitbang, BPKAD, dan Diskominfo Provinsi Kalimantan Tengah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR)* dari (Nilsen, 2015) yang menganalisis lima domain utama dalam proses implementasi: karakteristik intervensi, karakteristik pengguna, lingkungan pelaksanaan, proses implementasi, serta evaluasi dan umpan balik.

Data kuantitatif diperoleh dari dokumen APBD, RPJMD, dan nilai IPKD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021–2023, yang dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan uji korelasi Pearson untuk mengukur hubungan antara rasio surplus/defisit serta pendapatan dan belanja terhadap nilai IPKD (Nurdin & Hartati, 2019). Sementara data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap informan kunci, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, terdiri dari pejabat struktural dan tim penyusun IPKD. Analisis data kualitatif dilakukan dengan model Miles dan Huberman, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Ardieansyah et al., 2023). Pendekatan ini memberikan landasan empiris untuk menilai efektivitas implementasi IPKD serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam konteks tata kelola keuangan daerah.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Hasil penelitian kualitatif yang dilakukan melalui pengambilan data deskriptif berupa wawancara, dokumentasi serta analisis Dokumen seperti perturan terkait IPKD PP no 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri No 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) .

### 3.1. Implementasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di Provinsi Kalimantan Tengah

Implementasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di Provinsi Kalimantan Tengah mulai dijalankan sejak diberlakukannya Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, dan dikukuhkan lebih lanjut dengan Keputusan Mendagri No. 188.44/65/2024. IPKD menjadi instrumen resmi pemerintah pusat untuk menilai kinerja keuangan daerah secara objektif, dengan harapan mendorong transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan APBD.

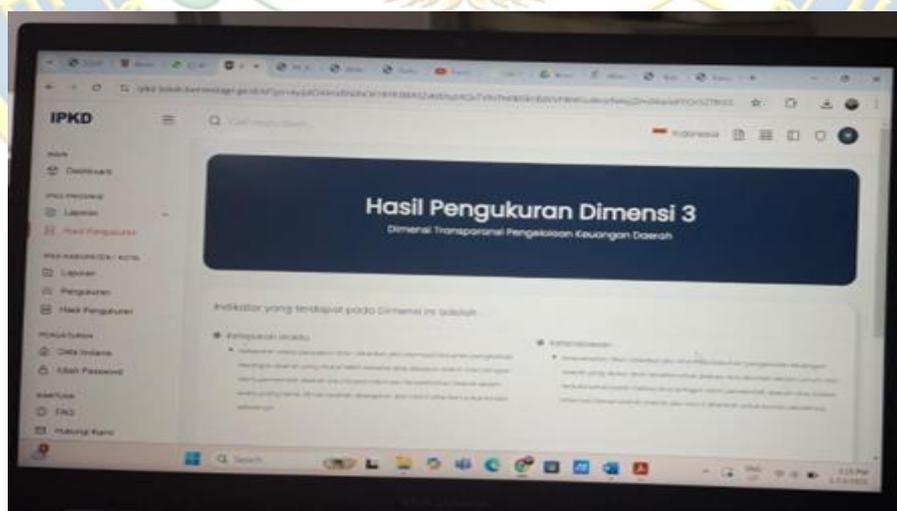
Penelitian ini menggunakan pendekatan teori CFIR (Consolidated Framework for Implementation Research) yang mencakup lima aspek: karakteristik intervensi, karakteristik pengguna, proses implementasi, lingkungan implementasi, serta evaluasi dan umpan balik. Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan dari Bappedalitbang, BKAD, dan Diskominfo Kalimantan Tengah, ditemukan sejumlah tantangan implementatif yang bersifat teknis maupun struktural.

#### Karakteristik Intervensi dan Pengguna

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bappedalitbang (Informan II), implementasi IPKD belum diiringi sosialisasi langsung dari Kemendagri, sehingga perangkat daerah harus belajar mandiri dari petunjuk teknis. Kepala Subbagian Pembiayaan Belanja Daerah (Informan III) menegaskan bahwa skor rendah pada dimensi 1 (perencanaan dan penganggaran) bukan karena rendahnya kinerja, melainkan karena kurangnya pemahaman terkait jenis dokumen yang harus diunggah. Selain itu, waktu input yang singkat dan kendala sistem juga berkontribusi terhadap buruknya nilai IPKD. Hal ini senada dengan pendapat dari tim Diskominfo, bahwa nilai dimensi 3 (transparansi) hanya mencapai 1,8 dari skor maksimal 15 karena dokumen yang tidak lengkap atau server down saat penginputan.

“Memang pada dimensi 1 yaitu perencanaan dan penganggaran mendapat skor rendah antara 2,45... karena tidak terpenuhinya data.” – Informan III, 2025.

Gambar di bawah ini menunjukkan antarmuka aplikasi IPKD yang digunakan dalam proses penginputan data:



Sumber : Dokumentasi pribadi,2025

**Gambar 1. 1**  
**Aplikasi IPKD Kemendagri**

Gambar 1.1. menunjukkan aplikasi IPKD Kemendagri Sebagai alat penilaian pengelolaan keuangan daerah, dimensi IPKD diciptakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya adalah untuk mendorong efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. IPKD menawarkan penilaian kinerja keuangan di tingkat daerah yang terdiri dari 6 faktor. Penjelasan tentang indikasi di setiap dimensi dan dokumentasi yang diperlukan dapat ditemukan dalam fitur program.

### **Proses Implementasi**

Tim IPKD Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari tiga OPD utama: Bappedalitbang sebagai koordinator, BKAD sebagai penginput dimensi keuangan dan pembiayaan, serta Diskominfo sebagai pengelola unggah dokumen ke sistem pusat. Namun, waktu yang disediakan hanya 5 hari kerja, yang menyebabkan input dilakukan secara terburu-buru dan kurang optimal. Koordinasi internal sering terhambat karena tidak semua OPD memiliki akses akun masing-masing untuk pengisian dimensi secara langsung, sehingga beban penginputan menumpuk pada Diskominfo.

### **Lingkungan Implementasi**

Lingkungan politik dan teknologis menjadi faktor eksternal utama yang memengaruhi kualitas pelaksanaan IPKD (Sinurat & Panjaitan, 2017). Menurut Informan dari BKAD, ketidaksesuaian antara dokumen RKPD dengan KUA-PPAS dipengaruhi oleh perubahan kebijakan politik dan lemahnya integrasi perencanaan lintas OPD. Selain itu, ketersediaan infrastruktur teknologi yang mendukung penginputan IPKD juga belum merata dan stabil.

“Pergeseran kebijakan yang mempengaruhi penganggaran daerah dapat memengaruhi kepatuhan terhadap pagu RKPD–KUA-PPAS.” – Informan IV, BKAD, 2025

### **Evaluasi dan Umpan Balik**

Evaluasi hasil IPKD menjadi landasan bagi penyusunan strategi perbaikan tahunan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut tim pelaksana IPKD, masih dibutuhkan koordinasi lanjutan dengan BSKDN Kemendagri untuk meninjau titik-titik kelemahan, baik dari sisi dokumen maupun sistem pelaporan. Kegiatan evaluasi tahunan seperti rapat koordinasi menjadi ruang untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki aspek yang kurang, misalnya memastikan semua dokumen dapat diakses publik melalui kanal resmi Diskominfo.

“Dengan perbaikan dari tahun ke tahun, Kalimantan Tengah dapat naik dari predikat ‘Perlu Perbaikan’ menjadi ‘Baik’, dan mendapat insentif dari pemerintah pusat.” – Informan V, BKAD, 2025

Implementasi IPKD di Provinsi Kalimantan Tengah masih menghadapi tantangan baik dari sisi teknis, koordinatif, maupun struktural. Nilai IPKD yang stagnan di angka 56,5 (kategori *perlu perbaikan*) menunjukkan perlunya pembenahan serius terutama pada dimensi perencanaan, transparansi, dan sistem koordinasi antar-OPD. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai predikat *baik*, Pemprov perlu melakukan perbaikan berkelanjutan dengan fokus pada sinkronisasi dokumen, peningkatan pemahaman teknis penginputan, serta penguatan infrastruktur dan koordinasi lintas lembaga.

### 3.2. Indeks pengelolaan Keuangan Daerah dipengaruhi Oleh Belanja Dan Pembiayaan serta pendapatan, defisit, surplus

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui analisis statistik data sekunder dengan korelasi pearson menggunakan aplikasi SPSS yang datanya bersumber dari dokumen APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 3 tahun terakhir dari 2021-2023 melihat korelasi antara Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dipengaruhi oleh belanja dan pembiayaan, serta pendapatan, defisit/surplus, maka data yang diperoleh adalah sebagai berikut.

Terkait penganggaran dan perencanaan, tiga komponen utamanya adalah pendapatan, pengeluaran, dan surplus atau defisit (Ismail & Enceng, 2019). Jika Anda memiliki cukup uang masuk, Anda dapat membuat anggaran yang wajar, dan jika Anda membelanjakannya dengan bijak dan sesuai prioritas, Anda dapat mencapai tujuan Anda. Baik dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari surplus dan defisit anggaran terasa dalam keputusan yang mengikutinya. Pertimbangan yang cermat terhadap faktor-faktor ini diperlukan untuk perencanaan yang berhasil. Statistik pendapatan, pengeluaran, dan surplus/defisit untuk tahun 2021–2023, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut, dapat digunakan untuk memeriksa hubungan antara ketiga variabel ini dan aspek RFI.

**Tabel 1.1**

#### Data Pendapatan, belanja serta surplus/defisit Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

	2021	2022	2023
Pendapatan	Rp. 5.199.634.633.666.73	Rp. 5.254.492.354.497	Rp. 6.146.829.889.952
Belanja	Rp 4.941.216.245.078.00	Rp 5.875.128.710.590	Rp 6.784.281.998.552
Suplus/Defisit	RP.614.880.942.394.35	Rp. 620.636.356.093	(Rp 367.452.108.600

Sumber : BKAD Provinsi Kalimantan Tengah

Pajak, retribusi, kekayaan yang dipisahkan, dan sumber pendapatan lain yang dapat diterima semuanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan tahunan, seperti yang terlihat pada tabel di atas (Mardiasmo, 2018). Anggaran Kalimantan Tengah mengalami defisit pada tahun 2022 dan 2023, dua tahun setelah mengalami surplus pada tahun 2021 dalam hal belanja pemerintah.

#### Correlations

		Pendapatan	Belanja	Suplus/Defisit
Pendapatan	Pearson Correlation	1	.887	-.997*
	Sig. (2-tailed)		.305	.046
	N	3	3	3
Belanja	Pearson Correlation	.887	1	-.852
	Sig. (2-tailed)	.305		.351
	N	3	3	3
Suplus/Defisit	Pearson Correlation	-.997*	-.852	1
	Sig. (2-tailed)	.046	.351	
	N	3	3	3

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil analisis di atas, diketahui bahwa:

1. Karena nilai signifikansi yang dihitung untuk pendapatan dan belanja adalah  $0,305 > 0,05$ , kita dapat menyimpulkan bahwa kedua variabel tersebut tidak berhubungan secara signifikan. Kemudian, kita menemukan bahwa hubungan antara pendapatan dan belanja cukup kuat dan positif dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,887. Sebagai aturan umum, belanja meningkat ketika pendapatan naik dan turun ketika pendapatan turun.
2. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pendapatan dan Surplus/Defisit karena nilai signifikansi yang diperoleh sebesar  $0,046 < 0,05$ . Langkah selanjutnya adalah mencari koefisien korelasi. Nilai -0,997 menunjukkan hubungan negatif yang sangat kuat antara pendapatan dan surplus/defisit. Hal ini menunjukkan bahwa surplus/defisit akan berkurang ketika pendapatan naik dan akan naik ketika pendapatan turun.

Dari data tersebut dapat menyimpulkan bahwa surplus/defisit dan belanja tidak memiliki hubungan yang signifikan karena nilai signifikansi yang dihitung adalah  $0,351 > 0,05$ . Kemudian, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,852, kita dapat melihat bahwa hubungan antara surplus/defisit dan pengeluaran sangatlah kuat dan negatif. Dengan demikian, surplus atau defisit akan menyusut seiring dengan peningkatan pengeluaran dan sebaliknya juga berlaku: seiring dengan penurunan pengeluaran, surplus atau defisit akan melebar.

### **3.3. Dimensi IPKD Yang Berkaitan Dengan Akuntabilitas**

Dimensi-dimensi dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) memiliki keterkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas, sebagai salah satu pilar utama dalam tata kelola keuangan daerah yang baik. Pada dimensi perencanaan dan penganggaran, akuntabilitas tercermin dari kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, hingga APBD. Kesesuaian antar dokumen ini menjadi ukuran sejauh mana perencanaan strategis pemerintah dapat dijalankan tanpa penyimpangan. Dalam workshop IPKD yang diselenggarakan tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menekankan pentingnya integrasi dan keterpaduan antar dokumen perencanaan agar prinsip *belanja berbasis kinerja* dapat diwujudkan secara optimal. Ini juga menjadi bukti bahwa akuntabilitas tidak hanya sebatas pelaporan, tetapi juga harus ditunjukkan sejak tahap perencanaan hingga penganggaran.

Pada dimensi pengalokasian anggaran dalam APBD, akuntabilitas diwujudkan melalui distribusi anggaran yang adil dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Dalam praktiknya, alokasi belanja daerah harus mencerminkan prinsip keadilan fiskal, mendukung prioritas pembangunan daerah, serta memperhatikan sektor-sektor strategis seperti kesehatan dan infrastruktur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, melalui evaluasi kinerja belanja, menemukan bahwa proporsi anggaran untuk beberapa sektor masih belum optimal. Hal ini menunjukkan perlunya reformulasi alokasi anggaran berdasarkan capaian kinerja dan manfaat langsung bagi masyarakat (Djumhana, 2007).

Dimensi penyerapan anggaran juga merupakan indikator nyata dari akuntabilitas, karena menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menyalurkan anggaran yang telah direncanakan secara efisien dan efektif. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran di beberapa OPD masih tergolong rendah. Hal ini menandakan adanya kendala dalam efisiensi birokrasi, lemahnya eksekusi program, serta kurangnya kemampuan manajerial yang akhirnya berdampak pada rendahnya outcome pembangunan yang dicapai. Rendahnya penyerapan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga cerminan lemahnya akuntabilitas struktural dalam sistem pengelolaan keuangan.

Lebih lanjut, pengawasan keuangan daerah menjadi bagian penting dari mekanisme akuntabilitas, baik secara vertikal melalui lembaga seperti Inspektorat dan BPK, maupun secara horizontal melalui kontrol publik dan partisipasi masyarakat (Siagian, 2001). Sistem akuntabilitas publik ini mengharuskan adanya transparansi informasi keuangan, akses data terbuka, dan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk turut mengawasi penggunaan dana daerah. Tata kelola keuangan yang baik, yang meliputi sistem kerja, prosedur administrasi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, merupakan tulang punggung dari sistem akuntabilitas yang berkelanjutan.

Terakhir, hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di berbagai OPD di Provinsi Kalimantan Tengah sudah menunjukkan capaian pada level “baik.” Namun demikian, akuntabilitas bukan hanya tercermin dalam laporan administratif semata, tetapi juga harus didukung oleh kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan adaptif. Masih diperlukan peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur, terutama dalam mengelola program berbasis hasil (*result-based budgeting*) agar capaian output dan outcome pembangunan dapat ditingkatkan secara signifikan. Dengan demikian, penguatan akuntabilitas dalam seluruh dimensi IPKD tidak hanya akan berdampak pada perbaikan skor IPKD, tetapi juga secara substantif meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

#### **3.4. Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah melalui penerapan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan korelatif yang signifikan antara kondisi keuangan daerah dengan surplus atau defisit pendapatan, yang keduanya menjadi indikator penting dalam mengukur efisiensi pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Surplus anggaran memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan beban keuangan di masa depan. Sebagai contoh, pada tahun anggaran 2021, Kalimantan Tengah mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan dalam dokumen APBD-nya, yang memungkinkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk pembiayaan proyek-proyek strategis seperti infrastruktur jalan, pembangunan fasilitas kesehatan, dan pengembangan layanan publik lainnya (Meiyenti, 2020). Dalam kondisi surplus, pemerintah daerah juga memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi untuk mengembangkan proyek jangka panjang tanpa bergantung pada pinjaman daerah, sehingga mampu menekan beban bunga dan meningkatkan efisiensi anggaran secara keseluruhan.

Sebaliknya, kondisi defisit pendapatan yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023 menjadi indikator adanya ketidakseimbangan struktural antara pendapatan dan belanja. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran daerah melebihi pendapatan yang diterima, sehingga berpotensi menimbulkan beban utang tambahan untuk menutup selisih tersebut. Ketika pemerintah terpaksa mengambil pinjaman daerah, konsekuensi logisnya adalah meningkatnya beban bunga yang harus dibayar di tahun berikutnya, yang pada akhirnya akan mengurangi ruang fiskal untuk membiayai sektor-sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dengan kata lain, defisit yang tidak terkelola dengan baik dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal dan menurunkan kualitas pembangunan jangka panjang. Korelasi antara defisit dan memburuknya kondisi keuangan juga memperlihatkan tantangan serius dalam tata kelola fiskal yang menuntut strategi perencanaan dan pengendalian anggaran yang lebih terukur.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi penting dalam membandingkan pendekatan penilaian kinerja keuangan daerah. Penulis meninjau kinerja keuangan melalui perspektif hubungan antara pendapatan, belanja, dan kondisi surplus/defisit dalam dokumen APBD secara menyeluruh, berbeda dari pendekatan yang digunakan oleh Hasna et al. (2023) yang menitikberatkan pada aspek alokasi dan penyerapan anggaran. Perbedaan pendekatan ini

menjadi penting karena memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kesehatan fiskal daerah, termasuk kemampuan pemerintah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran secara proporsional. Dalam praktiknya, temuan lapangan menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri) sebagai pembuat kebijakan IPKD, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pelaksana kebijakan. Perbedaan ini terutama menyangkut teknis pelaporan dan interpretasi atas indikator-indikator IPKD, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap skor yang diterima oleh daerah dalam penilaian IPKD tahunan.

Lebih lanjut, berdasarkan data pada Tabel 1.1 yang menggambarkan tren Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Tengah, terlihat adanya kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan sinyal positif bagi kemandirian fiskal daerah dan menunjukkan adanya potensi besar untuk memperkuat kinerja keuangan daerah secara berkelanjutan. Peningkatan PAD tidak hanya memperbesar kapasitas belanja daerah, tetapi juga membuka peluang untuk melakukan pemerataan pembangunan yang lebih terstruktur dan inklusif di berbagai sektor dan wilayah. Dengan dukungan pengelolaan fiskal yang akuntabel dan transparan, serta optimalisasi PAD, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat menciptakan siklus anggaran yang sehat dan produktif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat posisi IPKD Kalimantan Tengah di tingkat nasional.

### **3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di Provinsi Kalimantan Tengah masih menghadapi berbagai tantangan, baik secara teknis, struktural, maupun koordinatif. Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Wibawa et al., 2021) yang menyatakan bahwa kondisi riil laporan keuangan pemerintah daerah masih memerlukan banyak perbaikan, dan penggunaan IPKD diharapkan mampu menjadi pemicu peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan (Niu, 2020) yang mengkaji implementasi sistem pengukuran kinerja keuangan di berbagai pemerintah daerah Eropa, dimana mereka menemukan bahwa keberhasilan implementasi sistem pengukuran kinerja sangat bergantung pada kualitas koordinasi antar-lembaga, kapasitas teknis aparatur, dan dukungan teknologi informasi yang memadai. Sama halnya dengan temuan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun IPKD telah diterapkan sejak tahun 2020, namun nilai IPKD Kalimantan Tengah masih stagnan dalam kategori “perlu perbaikan”, yang mengindikasikan perlunya reformasi pada aspek perencanaan, transparansi, dan sistem koordinasi antar OPD.

Berbeda dengan penelitian (Hasna et al., 2023) yang menitikberatkan pada permasalahan pengalokasian dan penyerapan anggaran, temuan penelitian ini mengangkat aspek hubungan antara kondisi keuangan daerah dengan rasio surplus/defisit dan belanja. Penelitian ini membuktikan secara statistik adanya korelasi negatif yang signifikan antara pendapatan dengan surplus/defisit ( $r = -0,997$ ;  $sig. = 0,046$ ), yang menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah di Kalimantan Tengah sangat dipengaruhi oleh struktur pendapatan dan efisiensi belanja. Hal ini memberikan perspektif baru dalam melihat IPKD tidak hanya dari sisi penggunaan anggaran, tetapi juga dari keseimbangan fiskal yang tercermin dalam dokumen APBD.

Temuan ini juga memperluas hasil penelitian (Salsabila, 2022) yang mengkaji pengaruh dimensi IPKD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah secara parsial dan simultan. Salsabila menyatakan bahwa pengaruh parsial tidak signifikan, namun secara simultan terdapat pengaruh yang nyata. Dalam konteks Kalimantan Tengah, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam sinkronisasi dokumen RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS menyebabkan rendahnya skor dimensi perencanaan dan penganggaran, sekaligus menguatkan bahwa

penerapan IPKD harus ditopang oleh sistem perencanaan terintegrasi agar berpengaruh signifikan terhadap kinerja fiskal.

Di sisi lain, berbeda dengan hasil penelitian (Aditya, 2022) yang mencatat fluktuasi nilai IPKD di Kabupaten Demak namun tetap dalam rentang nilai baik hingga cukup, penelitian ini mencatat bahwa nilai IPKD Kalimantan Tengah cenderung stagnan pada skor rendah (sekitar 56,5). Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik daerah dan kualitas koordinasi internal sangat memengaruhi efektivitas implementasi IPKD. Penelitian ini menolak anggapan bahwa penerapan IPKD akan otomatis meningkatkan kinerja keuangan daerah tanpa dibarengi dengan kesiapan infrastruktur teknologi, kapasitas SDM, dan pembagian peran yang jelas antar instansi.

Selanjutnya, temuan penelitian ini juga sejalan dengan studi oleh (Putri, 2023) yang menyoroti pentingnya IPKD sebagai alat ukur akuntabilitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun akuntabilitas telah menjadi fokus dalam laporan seperti LAKIP, implementasi nyata di lapangan masih terbatas akibat kurangnya pemahaman teknis dan peran antar-OPD yang belum terdistribusi optimal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu memperkuat integrasi antardokumen perencanaan dan meningkatkan transparansi serta partisipasi publik agar akuntabilitas tidak hanya menjadi formalitas administratif.

### **3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Pendapatan, belanja, surplus, dan defisit memiliki pengaruh signifikan terhadap besaran dan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah. Peningkatan pendapatan, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun transfer dari pemerintah pusat, memberi keleluasaan fiskal bagi pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan dan proyek sosial secara lebih optimal. Data tahun 2021–2023 menunjukkan bahwa pendapatan Kalimantan Tengah tetap tinggi, memungkinkan belanja yang lebih fleksibel, asalkan dikelola secara efisien. Belanja daerah yang terencana dengan baik akan mendukung penyerapan anggaran yang maksimal. Sebaliknya, defisit anggaran dapat membatasi ruang fiskal, memaksa penundaan proyek, dan memicu ketergantungan pada pinjaman, yang dapat merusak reputasi fiskal daerah. Surplus memungkinkan percepatan proyek strategis yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam wawancara dengan Ibu Yanie Meiyanti, S.T., Kepala Subbagian Perencanaan Pengeluaran & Pembiayaan Daerah, dikonfirmasi bahwa tidak terdapat perubahan signifikan dalam hubungan antara pendapatan, belanja, dan surplus/defisit terhadap tingkat penyerapan anggaran selama periode 2021–2023. Penyerapan anggaran yang optimal hanya dapat dicapai jika didukung oleh pendapatan yang memadai, pengeluaran yang bijak, serta pengelolaan fiskal yang disiplin. Unsur-unsur yang memengaruhi IPKD dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi keseimbangan anggaran, transparansi, akuntabilitas, efisiensi belanja, pemanfaatan PAD, pengelolaan utang, kapasitas SDM, serta kepatuhan terhadap regulasi. Kinerja pada dimensi-dimensi tersebut sangat menentukan keberhasilan IPKD sebagai instrumen evaluatif keuangan daerah, yang jika dikelola dengan baik akan mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.

## **IV. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di Provinsi Kalimantan Tengah berperan penting dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah. Pertama, surplus pendapatan memberikan manfaat signifikan bagi stabilitas fiskal daerah, seperti memperkuat cadangan keuangan dan mengurangi ketergantungan pada utang, sedangkan defisit berkelanjutan berdampak negatif

terhadap kualitas layanan publik dan kredibilitas keuangan daerah. Kedua, implementasi IPKD telah berjalan melalui kolaborasi antara Bapperida, BKAD, dan Diskominfo, namun masih menghadapi kendala teknis seperti lambannya sistem akibat minimnya pemeliharaan aplikasi. Ketiga, IPKD menjadi simbol dan alat ukur tata kelola keuangan yang menekankan pentingnya perencanaan, evaluasi, dan transparansi. Untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu penguatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah serta penyempurnaan sistem penilaian IPKD agar lebih objektif dan terintegrasi.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek teknis dan ruang lingkup analisis. Secara teknis, rendahnya nilai IPKD pada beberapa dimensi lebih disebabkan oleh kesalahan input dan kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap sistem pengisian dokumen IPKD, bukan semata-mata karena lemahnya kinerja keuangan riil. Selain itu, penelitian hanya mencakup data tahun 2021–2023 dan melibatkan tiga instansi utama, sehingga belum mencerminkan dinamika lebih luas yang melibatkan aktor lain seperti DPRD, masyarakat sipil, dan sektor swasta yang juga memengaruhi tata kelola keuangan daerah.

**Arah Masa Depan Penelitian:** Penelitian ke depan dapat dikembangkan melalui pendekatan yang lebih komprehensif, seperti studi komparatif antar daerah dengan nilai IPKD tinggi, penggunaan metode longitudinal untuk mengamati tren jangka panjang, serta integrasi indikator digitalisasi dan partisipasi publik dalam penilaian IPKD. Selain itu, pendekatan evaluatif berbasis CFIR dapat dimanfaatkan untuk menilai implementasi IPKD secara menyeluruh, termasuk aspek proses, kesiapan SDM, dan koordinasi antar instansi guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih konkret dan aplikatif.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh hormat dan rasa syukur, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bappedalitbang, BPKAD, dan Diskominfo Provinsi Kalimantan Tengah atas dukungan, kerja sama, serta keterbukaan yang telah diberikan selama proses penelitian ini berlangsung. Bantuan informasi, data, serta kesempatan wawancara yang diberikan oleh pihak-pihak terkait sangat berperan penting dalam kelancaran penyusunan dan penyelesaian penelitian ini. Semoga sinergi antara dunia akademik dan instansi pemerintah ini dapat terus terjalin guna mendukung perbaikan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, D. H. (2022). *Penilaian Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018-2020 Menggunakan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Ipkd)* [Institut Agama Islam Negeri Kudus]. <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/7660>
- Ardieansyah, Asmungi, & Latip. (2023). *Metodologi Penelitian Sosial* (1 ed.). Deepublish.
- Djumhana, M. (2007). *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*. Citra Aditya Bakti.
- Hasna, K., Yusmina, N., & Siswantoro, D. (2023). *Hasil Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pendahuluan Keuangan daerah yang dikelola dengan baik mempunyai ciri , yaitu taat dan tertib pada efektif , eefisien , ttransparan , danaakuntabel . Analisis yang mendalam diperlukan terhadap*. 6(1), 157–180. <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku2768>
- Idrovo, A. J. (2021). Report From Bolsonaro’s Brazil: The Consequences of Ignoring Science. *International Journal of Health Services*, 51(1), 31–36. <https://doi.org/10.1177/0020731420968446>
- Ismail, T., & Enceng. (2019). Modul 1 Keuangan Daerah. In *Universitas Terbuka* (hal. 13). <https://www.pustaka.ut.ac.id>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi.
- Meiyenti, I. (2020). Implementasi Inovasi E-Kelurahan : Pelayanan Kelurahan Berbasis Elektronik Pada Kelurahan Di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat internet berbasis web untuk meningkatkan akses pemerintah kepada warga negara , Presiden RI No . 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan. *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 1(2), 70–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.37385/ceej.v1i2.114>
- Nilsen, P. (2015). Making sense of implementation theories, models and frameworks. *Implementation science : IS*, 10, 53. <https://doi.org/10.1186/s13012-015-0242-0>
- Niu, X. J. (2020). Has third-party monitoring improved environmental data quality? An analysis of air pollution data in China. *Journal of Environmental Management*, 253. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.109698>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. In *Metodologi Penelitian Sosial Dasar*. Media Sahabat Cendekia. <https://doi.org/10.11594/ubpress9786232967496>
- Parisi, C. (2022). Assessing and managing the impact of COVID-19: a study of six European cities participating in a circular economy project. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 35(1), 97–107. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2020-4837>
- PUTRI, S. A. (2023). *Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Ipkd) Sebagai Instrumen Pengukuran Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi Pemerintah Provinsi Lampung)* [Universitas Lampung]. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/69772>
- Salsabila, S. (2022). Analisis Pengaruh Dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang [Universitas Islam Sultan Agung]. In *Universitas Islam Sultan Agung* (Vol. 1, Nomor 1). [http://repository.unissula.ac.id/27586/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/27586/1/31401700147\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/27586/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/27586/1/31401700147_fullpdf.pdf)
- Siagian, S. P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. IPDN PRESS.

Sinurat, M., & Panjaitan, H. M. (2017). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah* (Agus Haidar (ed.); Cetakan Pertama).

Siti-Nabiha, A. K. (2020). Institutional work and implementation of a performance measurement and management system in a developing country. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 16(3), 447–467. <https://doi.org/10.1108/JAOC-07-2018-0060>

Wibawa, I. G. A., Sudemen, I. W., & Sawitri, M. Y. (2021). Kajian Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Jembrana. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 142–159. <https://doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.142-159>

